

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan awal mulanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dalam pembuatan keputusan daerah secara lebih leluasa. Untuk mengelola sumber daya sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. (Arthaingan, 2016:110).

Salah satu aspek Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah. Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2010:39).

Halim (2014:267) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.

Menurut V. Wiratna (2017:71) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil dari evaluasi terhadap kegiatan atau program yang digunakan sebagai salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat.

Mardiasmo (2010 : 112) mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah membantu memperbaiki kinerja pemerintah, mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan, serta mewujudkan akuntabilitas publik. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah dengan melakukan analisis laporan keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafisirkan angka-angka dalam laporan keuangan, bagaimana mengevaluasi laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan (Mahmudi, 2010 : 32).

Rasio Efektivitas (Halim, 2014 : 267) analisis rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efisiensi yaitu merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya (Halim 2010 : 234).

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Halim 2007:236).

Menurut Kasmir (2013:116) dalam bukunya yang berjudul pengantar manajemen keuangan mengatakan bahwa rasio pertumbuhan merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan, mempertahankan posisi ekonominya di tengah pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya.

Rasio Kemandirian yaitu bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Halim 2010:5).

Untuk mengetahui sampai sejauh mana analisis kinerja keuangan pada anggaran pendapatan belanja daerah berdasarkan rasio keuangan daerah Kabupaten Alor selama periode 2019-2021. Dibawah ini dapat dilihat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor periode 2019-2021.

Tabel 1.1

Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Alor Tahun 2019-2021

No	Tahun	APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2019	Rp.1.150.893.785.600,00	Rp. 1.114.939.149.547,31	96,88
2	2020	Rp.1.082.993.164.142,00	Rp. 1.078.695.689.498,22	99,60
3	2021	Rp.1.097.336.511.406,00	Rp. 1.083.381.602.006,49	98,73

Sumber Data: Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor, 2022

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019 sebesar Rp.1.150.893.785.600,00 , pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp.1.082.993.164.142,00, dan pada tahun 2021 jumlah anggaran pendapatan belanja daerah kembali mengalami peningkatan sebesar Rp.1.097.336.511.406,00. Untuk Perealisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.114.939.149.547,31, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.078.695.689.498,22, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.083.381.602.006,49. Sedangkan pada tingkat

presentase Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Alor 2019-2021 mengalami Fluktuasi dari tahun ke tahun.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mega Oktavia Ropa (2016) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, rasio efisiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, dan rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan, dan kurang baik untuk pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Machmud, George Kawung dan Wensy Rompas (2014) dengan judul “Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-20012”. Dengan hasil penelitian digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Utara masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan yang masih belum stabil atau begitu baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih mengalami angka yang naik turun untuk ketiga rasio yang diukur dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Alor)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini adalah : “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten Alor).”

1.3 Persoalan Penelitian

Persoalan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan Rasio efektivitas?
2. Bagaimana kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan rasio efesiensi?
3. Bagaimana kinerja keuangan daerah jika diukur menggunakan rasio keserasian?
4. Bagaimana kinerja keuangan jika diukur menggunakan rasio pertumbuhan?
5. Bagaimana kinerja keuangan jika diukur menggunakan rasio kemandirian?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah jika diukur dengan menggunakan rasio efektifitas.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Daerah jika diukur dengan

menggunkan rasio efesiensi.

3. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah jika diukur dengan menggunakan rasio keserasian.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah jika diukur dengan rasio pertumbuhan.
5. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah jika diukur dengan rasio kemandirian.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan ilmu manajemen khususnya dalam kajian Ekonomi Keuangan Daerah dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang (UKAW)

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan informasi dan pengawasan tambahan terhadap Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor dalam kaitannya mengenai kinerja keuangan dimasa yang akan datang khususnya pada anggaran APBD